



Katalog BPS: 3101021.82

# STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi Oktober 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**



# STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi Oktober 2018



**STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA**  
**Edisi Oktober 2018**

**No. Publikasi:** 82560.1810

**Katalog BPS:** 3101021.82

**Ukuran Buku:** 20 x 14 cm

**Jumlah Halaman:** v + 43 halaman

**Naskah:**

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

**Gambar Kulit:**

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

**Diterbitkan oleh:**

© Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

# *Kata Pengantar*



Publikasi Statistik Provinsi Maluku Utara edisi Oktober 2018 merupakan publikasi triwulanan berupa booklet yang berisi data dan informasi yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Publikasi ini diterbitkan sebagai ringkasan terhadap data-data statistik yang telah dipublikasikan oleh BPS Provinsi Maluku Utara, di antaranya yaitu melalui Berita Resmi Statistik.

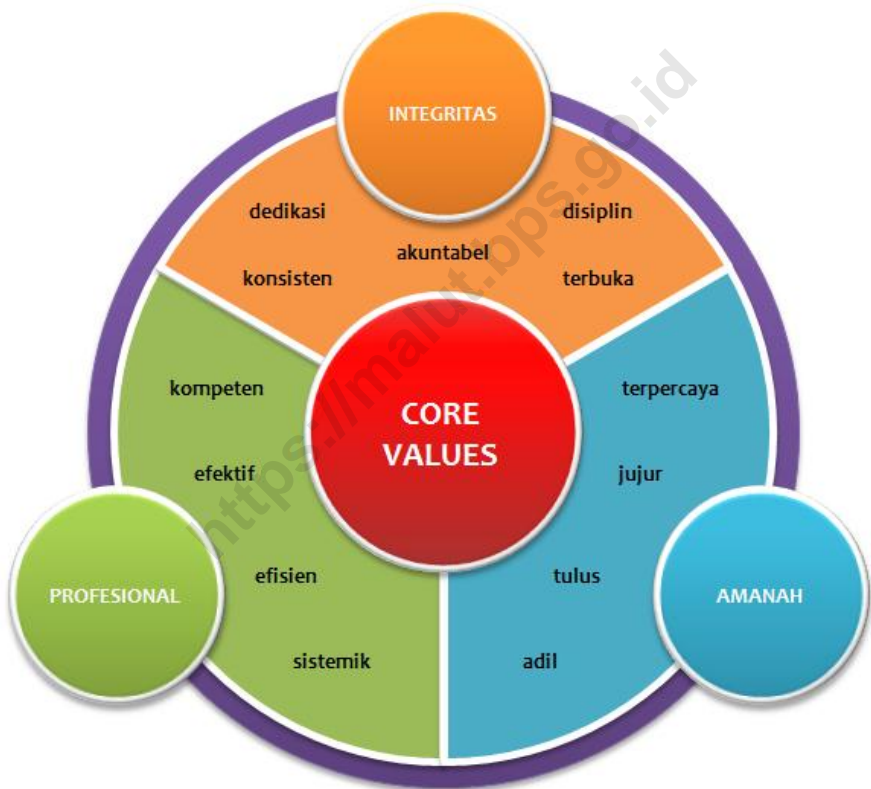
Semoga dengan terbitnya publikasi ini, dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat luas. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini.

Ternate, Oktober 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Maluku Utara

Drs. Misfaruddin, M.Si.

## NILAI INTI BPS (BPS Core Values)



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Nilai Inti BPS	iv
Daftar Isi	v
Kewilayahan	1
Penduduk	3
Ketenagakerjaan	6
Kemiskinan	11
Gini Ratio	15
Industri Manufaktur	16
Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi	20
Ekspor Dan Impor	22
Nilai Tukar Petani	25
Pariwisata	28
Produk Domestik Regional Bruto	31
Indeks Tendensi Konsumen	37
Indeks Pembangunan Manusia	38
Indeks Pembangunan Gender	41
Indeks Demokrasi Indonesia	42





## KEWILAYAHAN

## Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan/UPT Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/UPT
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	8	170
Halmahera Tengah	10	64
Kepulauan Sula	12	78
Halmahera Selatan	30	256
Halmahera Utara	17	199
Halmahera Timur	10	104
Pulau Morotai	5	88
Pulau Taliabu	8	71
Ternate	8	77
Tidore Kepulauan	8	90
<b>Maluku Utara</b>	<b>116</b>	<b>1 197</b>

Sumber: Direktori Desa Provinsi Maluku Utara Semester 1 2018

## Indikator Kewilayahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

Rincian	Persentase
(1)	(2)
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di tepi laut	78,68
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di dalam hutan	2,09
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di sekitar hutan	48,08
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang tidak memiliki SD/MI	8,70
- Persentase kecamatan yang memiliki Puskesmas/Puskesmas Pembantu	100,00
- Persentase kecamatan yang memiliki pasar dengan bangunan (baik permanen maupun semi permanen)	50,43
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang telah ada keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN	65,64
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang <b>belum</b> memiliki penerangan di jalan utama	62,12
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang hanya menggunakan sarana transportasi air	12,71
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang hanya menggunakan sarana transportasi darat	51,00
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang dapat menggunakan sarana transportasi baik darat maupun air	36,29
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang dapat menggunakan sarana transportasi darat dan memiliki kondisi jalan yang <b>tidak</b> dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sepanjang tahun	14,75

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes) 2014

## Indeks Kesulitan Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	23,74	48,56	82,75
Halmahera Tengah	26,98	44,81	72,44
Kepulauan Sula	22,01	51,08	81,92
Halmahera Selatan	19,71	61,21	84,79
Halmahera Utara	17,05	47,67	82,04
Halmahera Timur	14,33	48,81	78,43
Pulau Morotai	18,84	52,62	82,69
Pulau Taliabu	32,78	70,17	85,20
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	17,33	44,24	69,70
<b>Maluku Utara</b>	<b>14,33</b>	<b>51,69</b>	<b>85,20</b>

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes) 2014

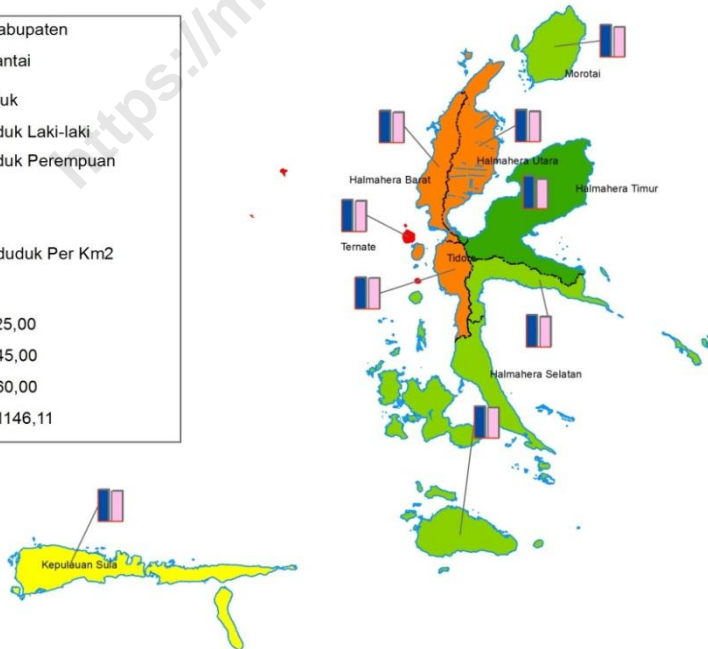
- Beberapa indikator kewilayahan bisa dilihat dari data Pendataan Potensi Desa (Podes).
- Pendataan Podes dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 10 tahun, Podes terakhir yaitu Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014.
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin besar IKG menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi pada wilayah desa tersebut.

## PENDUDUK

### Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	106 791	108 769	110 717	112 722	114 502
Halmahera Tengah	47 079	48 414	49 807	51 315	52 813
Kepulauan Sula	91 406	93 435	95 285	97 177	99 196
Halmahera Selatan	211 682	215 791	219 836	223 460	227 280
Halmahera Utara	173 117	176 573	180 100	183 596	187 104
Halmahera Timur	80 526	82 914	85 188	87 680	90 070
Pulau Morotai	57 565	59 102	60 727	62 412	64 001
Pulau Taliabu	49 510	50 067	50 709	51 316	51 928
Ternate	202 728	207 789	212 997	218 028	223 111
Tidore Kepulauan	94 493	95 813	96 979	98 206	99 337
<b>Maluku Utara</b>	<b>1 114 897</b>	<b>1 138 667</b>	<b>1 162 345</b>	<b>1 185 912</b>	<b>1 209 342</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2010



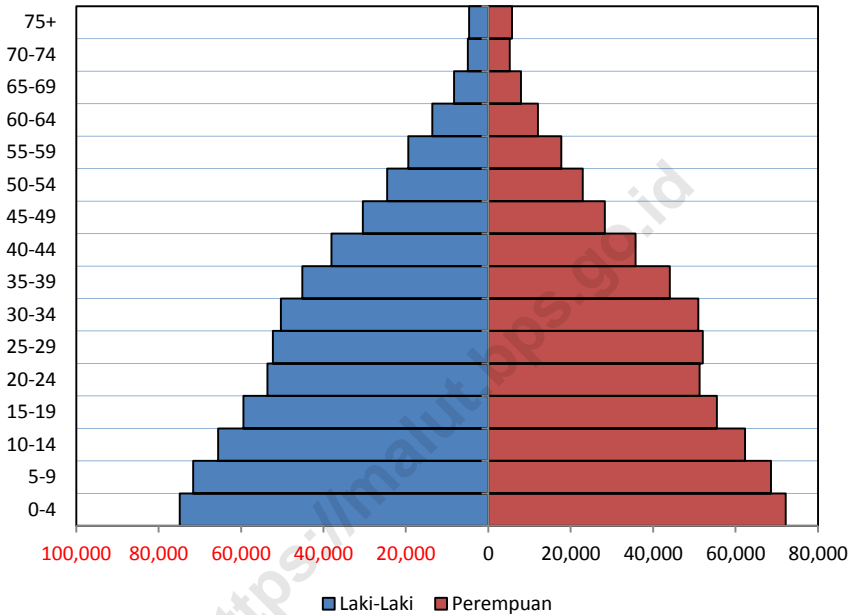
**Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017**

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	74 889	72 175	147 064
5-9	71 628	68 581	140 209
10-14	65 525	62 281	127 806
15-19	59 438	55 439	114 877
20-24	53 577	51 308	104 885
25-29	52 309	52 079	104 388
30-34	50 296	50 986	101 282
35-39	45 157	44 052	89 209
40-44	38 058	35 717	73 775
45-49	30 481	28 241	58 722
50-54	24 529	22 943	47 472
55-59	19 407	17 735	37 142
60-64	13 569	12 077	25 646
65-69	8 337	7 891	16 228
70-74	5 002	5 198	10 200
75+	4 656	5 781	10 437
<b>Jumlah</b>	<b>616 858</b>	<b>592 484</b>	<b>1 209 342</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Hasil SP 2010

- Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

**Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara  
Tahun 2017**



## KETENAGAKERJAAN

### Penduduk Provinsi Maluku Utara Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama (ribu orang)

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	801,8	811,0	822,4
2. Angkatan Kerja	557,1	516,2	588,0
Bekerja	530,2	488,7	560,6
Pengangguran	26,8	27,5	27,4
3. Bukan Angkatan Kerja	244,7	294,8	234,5
Sekolah	74,0	87,7	73,7
Mengurus Rumah Tangga	144,0	177,9	138,4
Lainnya	26,6	29,1	22,3
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,5	63,7	71,5
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8	5,3	4,7
6. Pekerja tidak penuh	170,7	157,8	189,9
Setengah Penganggur	56,8	48,4	62,4
Paruh Waktu	113,9	109,4	127,4

### Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	44,14	40,72	39,84
B Pertambangan dan Penggalian	3,00	2,96	3,81
C Industri Pengolahan	6,90	7,17	8,54
D Pengadaan Listrik dan Gas		0,05	0,28
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,12	0,15
F Konstruksi	6,02	6,10	5,66
G Perdag Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	13,12	11,85	14,94
H Transportasi dan Pergudangan	5,14	5,71	4,58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,11	1,73	2,24
J Informasi dan Komunikasi	0,32	0,48	0,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	1,15	0,44
L Real Estat		0,04	0,00
M,N Jasa Perusahaan	0,45	0,86	0,80
O Admn Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9,27	10,26	9,41
P Jasa Pendidikan	5,59	7,01	5,13
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	1,33	1,33
R,S,T,U Jasa Lainnya	2,55	2,46	2,36
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (persen)**

Status Pekerjaan Utama	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	100,8	113,0	108,1
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	111,9	83,9	118,8
Berusaha dibantu buruh tetap	24,2	15,0	21,7
Buruh/karyawan	156,1	171,0	175,3
Pekerja bebas di pertanian	9,3	17,0	8,4
Pekerja bebas di non pertanian	11,9	16,4	22,8
Pekerja keluarga/tak dibayar	116,0	72,5	105,5
<b>Jumlah</b>	<b>530,3</b>	<b>488,7</b>	<b>560,6</b>

**Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Perminggu (ribu Orang)**

Jumlah Jam Kerja Perminggu	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1 – 7	7,9	10,90	25,8
8 – 14	28,6	27,12	36,3
15 – 24	45,9	54,54	65,9
25 - 34	88,3	65,23	61,8
1 - 34	170,7	157,79	189,8
35 *)	359,6	330,93	370,7
<b>Jumlah</b>	<b>530,3</b>	<b>488,72</b>	<b>560,6</b>

Keterangan : \*) termasuk sementara tidak bekerja

**Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan (ribu Orang)**

Tingkat Pendidikan	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	235,8	188,5	242,3
Sekolah Menengah Pertama	93,9	86,4	93,7
Sekolah Menengah Atas	107,2	111,7	127,4
Sekolah Menengah Kejuruan	25,9	26,3	24,7
Diploma I/II/III	10,1	14,4	10,7
Universitas	57,4	61,4	61,9
<b>Total</b>	<b>530,3</b>	<b>488,7</b>	<b>560,6</b>

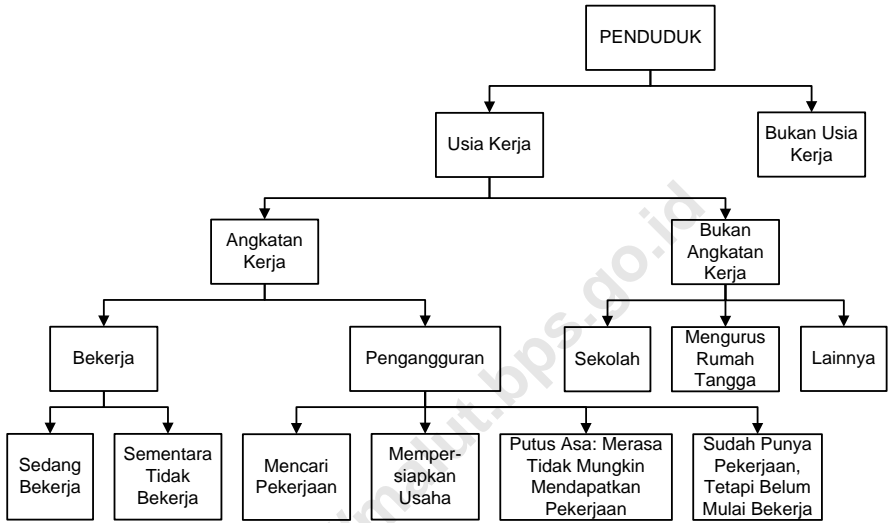
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen)**

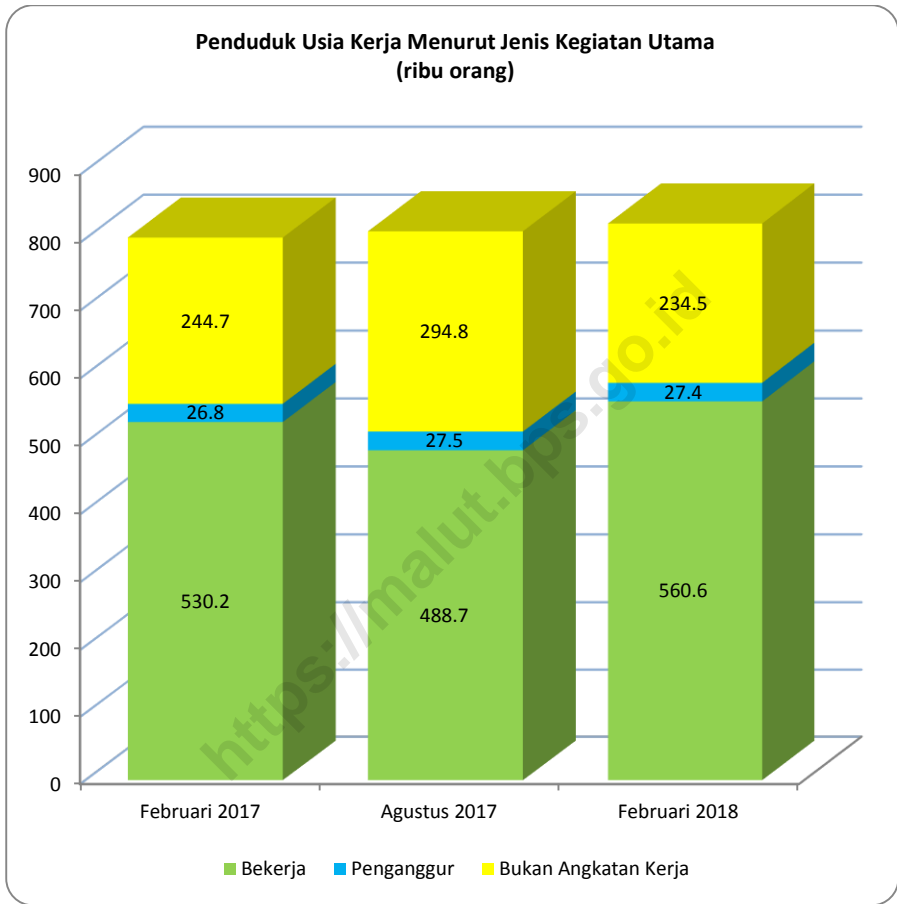
Tingkat Pendidikan	Februari 2017	Agustus 2017	Februari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
SD ke bawah	1,41	2,28	1,70
Sekolah Menengah Pertama	4,78	3,84	1,46
Sekolah Menengah Atas	8,41	9,65	7,14
Sekolah Menengah Kejuruan	9,31	8,15	14,21
Diploma I/II/III	21,58	7,92	7,38
Universitas	5,72	6,35	10,23
<b>Total</b>	<b>4,82</b>	<b>5,33</b>	<b>4,65</b>

- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
  - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
  - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.



**Diagram Ketenagakerjaan**





## KEMISKINAN

### Jumlah, Komposisi dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2012	7,57	84,35	91,91	2,55	10,69	8,47
Sep 2012	8,75	79,62	88,36	2,92	9,98	8,05
Mar 2013	9,16	74,04	83,20	2,99	9,22	7,50
Sep 2013	11,02	74,56	85,58	3,56	9,19	7,64
Mar 2014	12,19	70,45	82,64	3,95	8,56	7,30
Sep 2014	11,17	73,62	84,79	3,58	8,85	7,41
Mar 2015	12,25	67,65	79,90	3,85	7,95	6,84
Sep 2015	8,29	64,35	72,65	2,61	7,57	6,22
Mar 2016	10,58	64,10	74,68	3,32	7,44	6,33
Sep 2016	12,45	63,95	76,40	3,76	7,43	6,41
Mar 2017	12,00	64,47	76,47	3,61	7,40	6,35
Sep 2017	12,93	65,35	78,28	3,70	7,55	6,44
Mar 2018	13,34	68,12	81,46	3,80	7,78	6,64

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

### Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Periode	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)			Pertumbuhan GK (%)
	K	D	K+D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mar 2012	268 729	232 109	242 112	2,33
Sep 2012	276 117	240 447	250 184	3,33
Mar 2013	284 374	248 026	258 060	3,15
Sep 2013	317 176	281 482	291 352	12,90
Mar 2014	321 231	286 242	295 787	1,52
Sep 2014	339 561	307 374	316 160	6,89
Mar 2015	360 933	337 789	344 088	1,52
Sep 2015	378 538	356 325	362 370	6,89
Mar 2016	390 788	371 289	376 554	3,91
Sep 2016	405 368	379 454	386 489	2,64
Mar 2017	410 412	383 784	390 998	1,17
Sep 2017	413 797	390 914	397 340	1,62
Mar 2018	428 897	405 558	412 266	3,76

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

## Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> )			Indeks Keparahan Kemiskinan (P <sub>2</sub> )		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2011	0,149	1,497	1,129	0,010	0,280	0,206
Sep 2011	0,473	2,754	2,137	0,109	0,884	0,674
Mar 2012	0,279	1,824	1,402	0,090	0,459	0,359
Sep 2012	0,078	1,135	0,846	0,003	0,196	0,143
Mar 2013	0,314	0,951	0,775	0,046	0,178	0,141
Sep 2013	0,270	1,127	0,890	0,036	0,210	0,162
Mar 2014	0,439	1,351	1,102	0,073	0,327	0,257
Sep 2014	0,398	1,444	1,159	0,074	0,309	0,245
Mar 2015	0,290	0,858	0,703	0,036	0,160	0,126
Sep 2015	0,611	1,348	1,148	0,143	0,320	0,272
Mar 2016	0,367	0,861	0,728	0,064	0,218	0,177
Sep 2016	0,249	1,176	0,918	0,023	0,275	0,205
Mar 2017	0,667	0,861	0,808	0,246	0,183	0,200
Sep 2017	0,572	0,911	0,814	0,106	0,166	0,149
Mar 2018	0,690	0,972	0,892	0,187	0,194	0,192

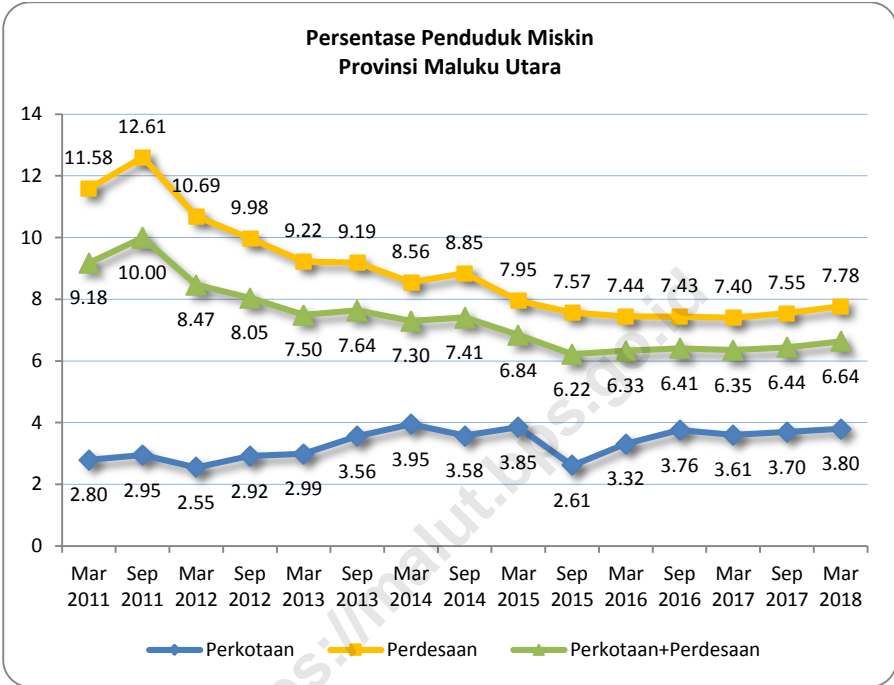
Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

- Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Sumber data yang digunakan adalah data Modul Konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap triwulan.
- Metode yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.
- *Head Count Index* mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* ( $P_1$ ) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- Indeks Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* ( $P_2$ ), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
- Garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).
- Penghitungan penduduk miskin sampai dengan tahun 2010 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) tahun 2005.
- Penghitungan penduduk miskin tahun 2011 s.d. 2017 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010).



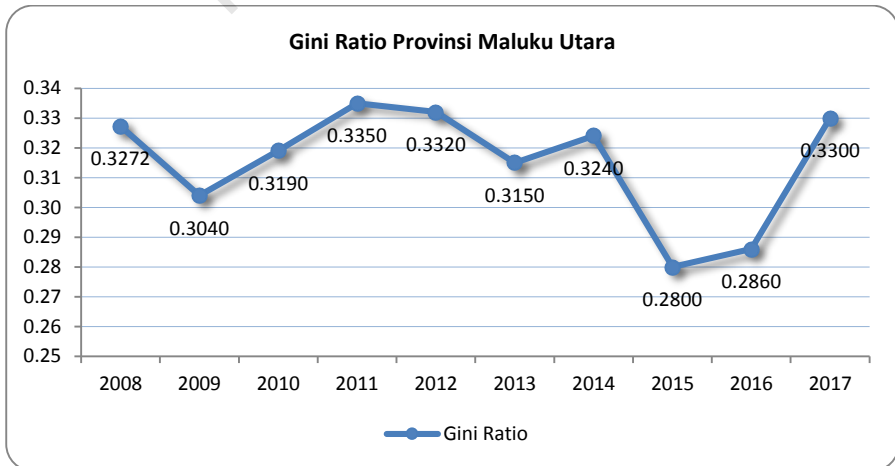
## GINI RATIO

## Perkembangan Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2010	2011*)	2012*)	2013*)	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	0,311	0,255	0,252	0,223	0,249	0,234	0,258	0,238
Halmahera Tengah	0,261	0,286	0,282	0,257	0,339	0,322	0,265	0,291
Kepulauan Sula	0,326	0,316	0,317	0,267	0,295	0,298	0,262	0,257
Halmahera Selatan	0,285	0,248	0,266	0,274	0,303	0,244	0,209	0,265
Halmahera Utara	0,295	0,283	0,338	0,253	0,312	0,291	0,257	0,235
Halmahera Timur	0,308	0,297	0,261	0,248	0,271	0,264	0,266	0,318
Pulau Morotai	0,308	0,262	0,287	0,315	0,288	0,269	0,241	0,288
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	0,233	0,273	0,243
Ternate	0,233	0,276	0,289	0,254	0,293	0,245	0,270	0,281
Tidore Kepulauan	0,227	0,251	0,239	0,257	0,222	0,205	0,227	0,227
<b>Maluku Utara</b>	<b>0,319</b>	<b>0,335</b>	<b>0,332</b>	<b>0,315</b>	<b>0,324</b>	<b>0,280</b>	<b>0,286</b>	<b>0,330</b>

\*) Hasil Backcasting 2011-2013

- Gini ratio (koefisien gini) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
- Nilai Gini ratio ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini ratio, menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Gini ratio adalah 0 (nol), maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 (satu), berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.
- Penghitungan Gini ratio menggunakan pendekatan data pengeluaran hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).



## INDUSTRI MANUFAKTUR

## Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen)

Tahun	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012	2,03	-	2,79	-	3,22	-	4,63	-
2013	2,16	13,40	2,54	13,13	2,04	11,83	1,33	8,31
2014	0,93	7,01	2,42	6,88	8,67	13,83	1,37	13,87
2015	4,88	15,53	5,42	21,79	-1,03	10,92	-2,17	7,05
2016	-0,69	1,37	-0,94	-0,80	-2,04	-2,71	0,68	-2,96
2017	-1,73	-3,98	2,73	-0,43	1,74	3,41	2,62	5,39
2018	-0,67	6,53	4,09	-49,70				

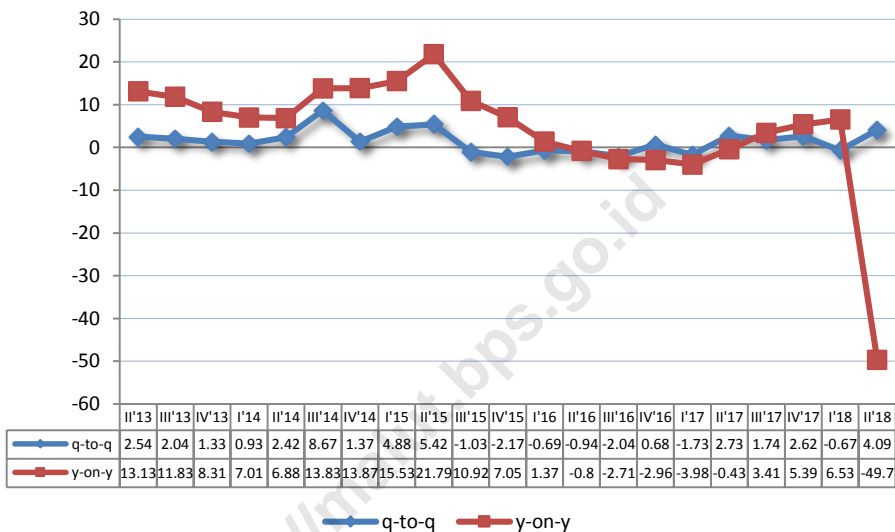
## Pertumbuhan (persen) Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil

Kode KBLI	Jenis Industri	Triwulan I 2018		Triwulan II 2018	
		q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Industri Makanan	8,03	21,83	2,53	8,93
11	Industri Minuman	5,26	25,87	16,73	-8,54
14	Industri Pakaian Jadi	7,13	-5,32	30,68	15,30
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	7,20	50,55	4,12	51,07
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	36,42	NA	1,56	NA
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik			22,22	NA
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	5,39	7,59	-5,13	15,22
24	Industri Logam Dasar	0,39	38,48	-7,06	30,09
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5,91	37,40	-9,90	-26,18
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	128,57	28,63	-33,33	-21,87
31	Industri Furnitur	18,59	63,47	-1,16	37,99
32	Industri Lainnya	60,81	95,33	83,08	NA
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-2,80	NA	-1,67	NA
	IMK (Industri Mikro dan Kecil)	11,89	41,26	1,58	36,39

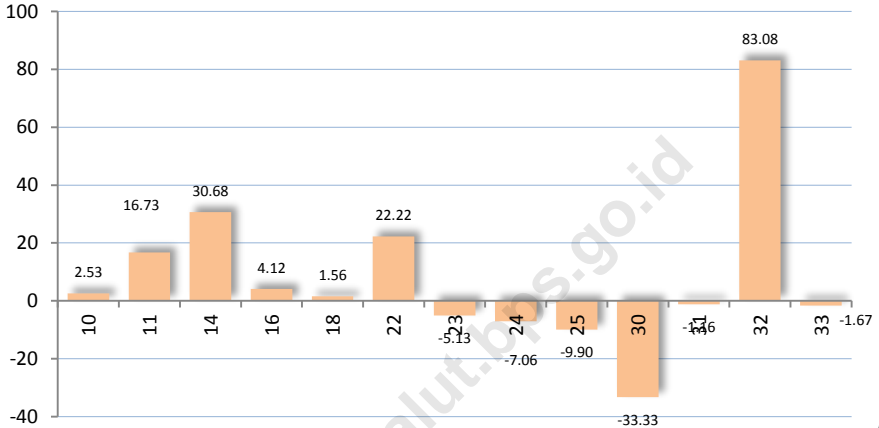


- Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).
- Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu: Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang).
- Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.
- Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4 , yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009.

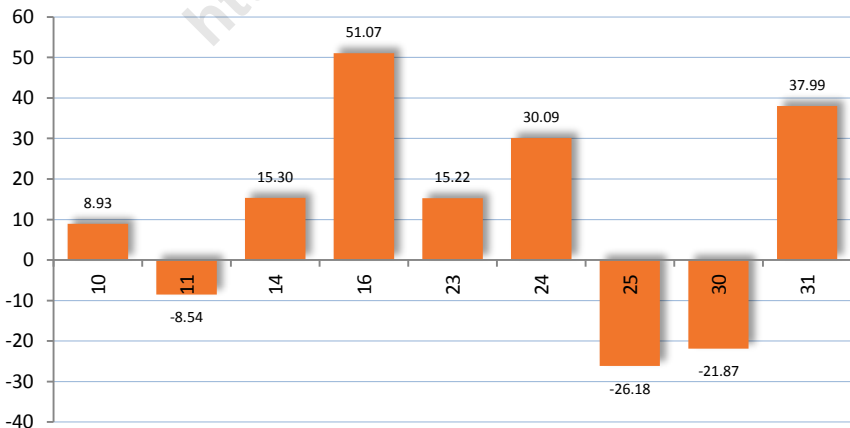
**Perkembangan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen)**



**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil  
Triwulanan (y-on-y), Triwulan II Tahun 2018 Terhadap Triwulan I  
Tahun 2018, Menurut Jenis KBLI**



**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil  
Triwulanan (q-to-q), Triwulan II Tahun 2018 Terhadap Triwulan I  
Tahun 2018, Menurut Jenis KBLI**



## INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI

### Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (%) Kota Ternate dan Nasional

Bulan	Ternate				Nasional			
	IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Tahun Kalender	Year on Year	IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Tahun Kalender	Year on Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ags '16	129,66	-0,1	1,43	2,31	125,13	-0,02	1,74	2,79
Sep '16	129,78	0,09	1,53	4,05	125,41	0,23	1,97	3,08
Okt '16	129,51	-0,21	1,31	2,89	125,59	0,14	2,11	3,31
Nov '16	129,85	0,26	1,58	3,14	126,18	0,47	2,59	3,58
Des '16	130,27	0,32	1,91	1,91	126,71	0,42	3,02	3,02
Jan '17	131,09	0,63	0,63	2,02	127,94	0,97	0,97	4,53
Peb '17	131,13	0,03	0,66	3,02	128,24	0,24	1,21	3,83
Mar '17	130,72	0,31	0,35	2,41	128,22	0,01	1,19	3,82
Apr '17	131,19	0,36	0,71	2,72	128,33	0,09	1,28	4,17
Mei '17	131,45	0,20	0,91	2,63	128,83	0,40	1,68	4,33
Jun '17	133,49	1,55	2,47	3,92	129,72	0,69	2,38	4,37
Jul '17	134,56	0,80	3,29	3,68	130,00	0,22	2,60	3,88
Ags '17	132,53	-1,51	1,73	2,21	129,91	-0,07	2,53	3,83
Sep '17	131,86	-0,51	1,22	1,60	130,08	0,13	2,66	3,72
Okt '17	132,55	0,52	1,75	2,35	130,09	0,01	2,67	3,58
Nov '17	131,15	-1,06	0,68	1,00	130,34	0,20	2,87	3,30
Des '17	132,84	1,29	1,97	1,97	131,28	0,71	3,61	3,61
Jan '18	133,71	0,65	0,65	2,00	132,09	0,62	0,62	3,24
Feb '18	134,19	0,36	1,02	2,33	132,32	0,17	0,79	3,18
Mar '18	135,01	0,61	1,63	3,28	132,58	0,20	0,99	3,40
Apr '18	135,84	0,61	2,26	3,54	132,71	0,10	1,09	3,41
Mei '18	136,38	0,40	2,66	3,75	132,99	0,21	1,30	3,23
Jun '18	138,71	1,71	4,42	3,91	133,77	0,59	1,90	3,12
Jul '18	137,09	-1,17	3,20	1,88	134,14	0,28	2,18	3,18
Ags '18	136,71	-0,28	2,91	3,15	134,07	-0,05	2,13	3,20

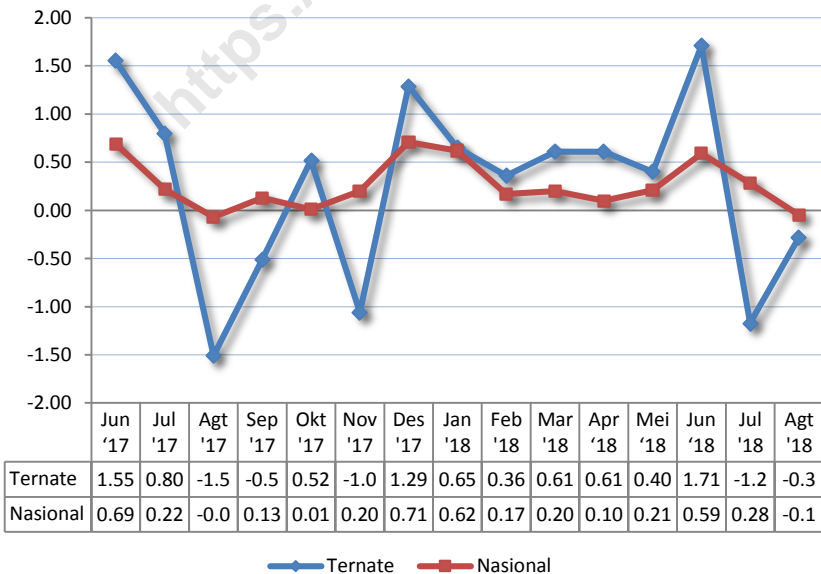
- Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
- Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.

- Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.
- *Year on year* adalah inflasi selama setahun dengan membandingkan IHK bulan tertentu pada tahun ke-n dengan IHK bulan yang sama pada tahun ke-(n-1).
- Cara menghitung inflasi bulan ke-n yaitu:

$$\left[ \left( \frac{\text{IHK}(n)}{\text{IHK}(n-1)} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

- Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012 = 100, dimana terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012 = 100) dibandingkan IHK lama (2007 = 100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang.
- Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.
- Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

Inflasi Bulanan Kota Ternate dan Nasional



## EKSPOR DAN IMPOR

## Perkembangan Berat Bersih dan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara

Bulan	Berat Bersih(Ton)	Nilai(US \$)
(1)	(2)	(3)
Mei '17	188 053	19 205 862
Jun '17	71 148	12 746 868
Jul '17	182 621	22 532 792
Ags '17	292 553	21 655 468
Sep '17	311 419	40 008 168
Okt '17	348 952	12 349 126
Nov '17	345 531	39 053 337
Des '17	646 738	51 629 617
Jan '18	659 047	19 530 480
Feb '18	697 700	51 214 679
Mar '18	685 065	46 391 875
Apr '18	874 893	45 932 913
Mei '18	1 159 769	78 215 716
Jun '18	803 175	25 601 985
Jul '18	960 416	72 321 826

## Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Komoditi (US \$)

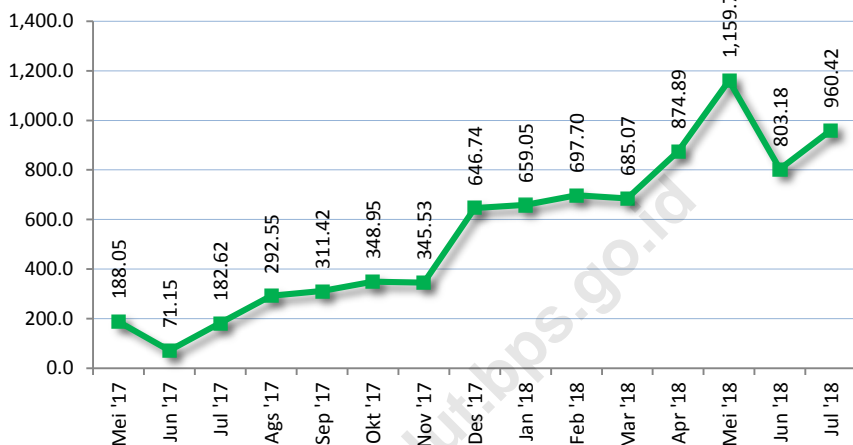
Bulan	Besi dan Baja (72)	Other tube, pipes & hollow profile, seamless, unfinished drill pipe (green pipe)		Bijih, Kerak dan Abu Logam (26)	Jumlah
		(3)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Ags '17	13 370 018	-	8 285 450	21 655 468	
Sep '17	29 583 253	125 275	10 299 640	40.008.168	
Okt '17	-	-	12 349 126	12 349 126	
Nov '17	25 800 850	-	13 252 487	39 053 337	
Des '17	31 694 306	-	19 935 311	51 629 617	
Jan '18	-	-	19 530 480	19 530 480	
Feb '18	30 519 959	-	20 694 720	51 214 679	
Mar '18	24 838 755	-	21 553 120	46 391 875	
Apr '18	17 532 273	-	28 400 640	45 932 913	
Mei '18	41 478 275	-	36 737 441	78 215 716	
Jun '18	-	-	25 601 985	25 601 985	
Jul '18	41 377 109	-	30 944 717	72 321 826	

**Perkembangan Berat Bersih dan Nilai Impor Provinsi Maluku Utara**

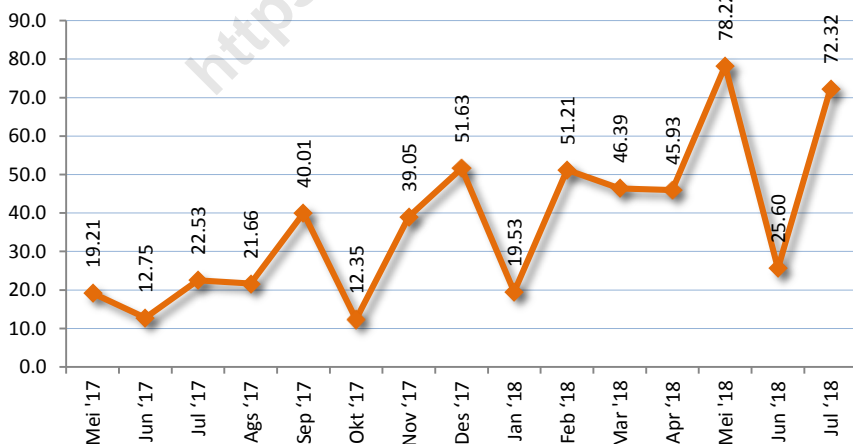
<b>Bulan</b>	<b>Berat Bersih(kg)</b>	<b>Nilai(US \$)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Peb '17	2 112 566	1 747 199
Mar '17	2 183 194	2 228 921
Apr '17	56 500 210	5 607 893
Mei '17	14 567 364	9 207 744
Jun '17	38 700 375	10 031 402
Jul '17	38 700 375	1 577 311
Ags '17	33 663 707	35 748 831
Sep '17	76 389 888	17 525 337
Okt '17	19 514 515	11 358 425
Nov '17	11 674 161	20 155 394
Des '17	42 432 153	27 011 101
Jan '18	4 933 541	10 097 273
Feb '18	82 022 343	16 565 727
Mar '18	9 372 199	33 065 052
Apr '18	31 602 189	8 321 059
Mei '18	35 288 966	35 328 713
Jun '18	68 182 509	10 045 183
Jul '18	7 048 012	19 054 433

- Ekspor meliputi seluruh barang yang keluar dari wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial seperti bantuan kredit lunak, hadiah dan sebagainya.
- Ekspor kapal laut dan pesawat udara termasuk dalam statistik ekspor sedangkan ekspor bunker oil untuk kapal tidak tercatat.
- Data ekspor dikumpulkan berdasarkan dokumen ekspor/pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang diisi oleh eksportir dan telah diberikan ijin muat oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, dan selanjutnya dikirim ke BPS.
- Impor meliputi seluruh barang-barang yang masuk ke wilayah kepabeanaan Indonesia.
- Data impor dikumpulkan berdasarkan dokumen impor/Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diisi oleh importir.

**Perkembangan Volume Ekspor Maluku Utara  
(ribu ton)**



**Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara  
(juta US\$)**





## NILAI TUKAR PETANI

### Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara

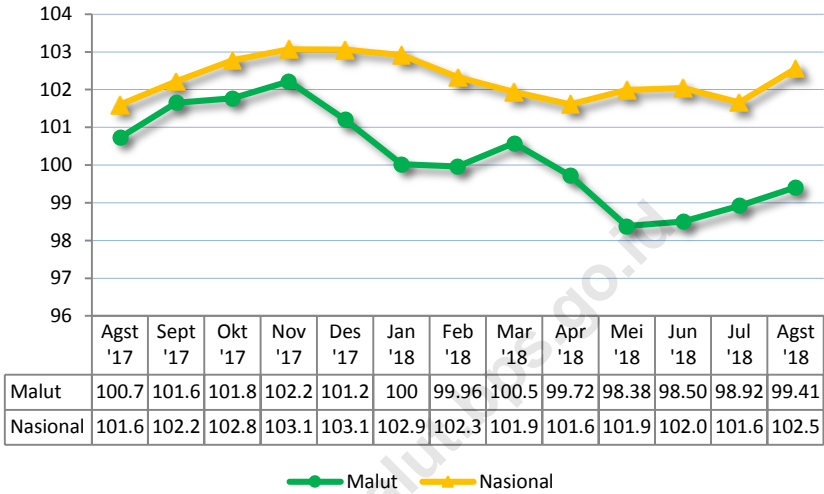
Bulan	NTP Per Sub Sektor					NTP Malut	NTP Nasional
	Tanaman Pangan	Hortikultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Agst 2017	101,48	107,79	94,07	107,57	102,47	100,73	101,60
Sep 2017	100,40	109,47	95,96	107,81	103,03	101,65	102,22
Okt 2017	101,29	108,84	96,45	107,31	102,12	101,77	102,78
Nov 2017	102,11	109,09	96,81	107,43	103,27	102,22	103,07
Des 2017	101,21	109,01	94,56	107,41	104,13	101,20	103,06
Jan 2018	101,60	107,02	92,38	107,63	103,74	100,02	102,92
Feb 2018	101,31	106,54	92,14	108,34	105,21	99,96	102,33
Mar 2018	101,72	107,24	92,45	109,64	106,74	100,58	101,94
Apr 2018	101,22	106,22	91,38	108,27	107,36	99,72	101,61
Mei 2018	99,25	105,67	89,14	108,75	107,37	98,38	101,99
Juni 2018	99,09	105,88	88,78	110,23	108,52	98,50	102,04
Jul 2018	99,78	105,83	89,41	111,19	107,23	98,92	101,66
Agst 2018	99,80	107,29	89,58	111,86	107,82	99,41	102,56

### Perkembangan Inflasi Perdesaan Maluku Utara dan Nasional

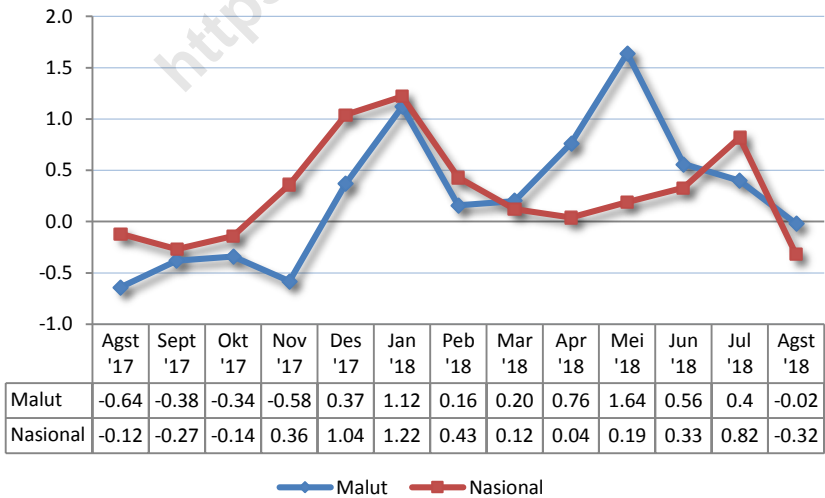
Bulan	Inflasi Perdesaan Maluku Utara	Inflasi Perdesaan Nasional
(1)	(2)	(3)
Agst 2017	-0,64	-0,12
Sep 2017	-0,38	-0,27
Okt 2017	-0,34	-0,14
Nov 2017	-0,58	0,36
Des 2017	0,37	1,04
Jan 2018	1,12	1,22
Feb 2018	0,16	0,43
Mar 2018	0,20	0,12
Apr 2018	0,76	0,04
Mei 2018	1,64	0,19
Juni 2018	0,56	0,33
Jul 2018	0,40	0,82
Agst 2018	-0,02	-0,32

- Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
- Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian diperdesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.
- NTP terdiri dari 5 (lima) sub-sektor, yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), Peternakan dan Perikanan.
- Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.
- Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumahtangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumahtangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.
- Nilai tukar petani (NTP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani.
- Cara penghitungan NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dikalikan seratus.
- Indeks Konsumsi Rumah tangga (IKRT) merupakan bagian dari indeks yang dibayar oleh petani untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga.
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) meliputi sub kelompok antara lain: bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan rekreasi & olah raga serta transportasi dan komunikasi.
- Perubahan nilai Indeks Konsumsi Rumah Tangga lebih dikenal sebagai Inflasi Perdesaan.

**Perkembangan Nilai Tukar Petani**



**Perkembangan Inflasi Perdesaan**



## PARIWISATA

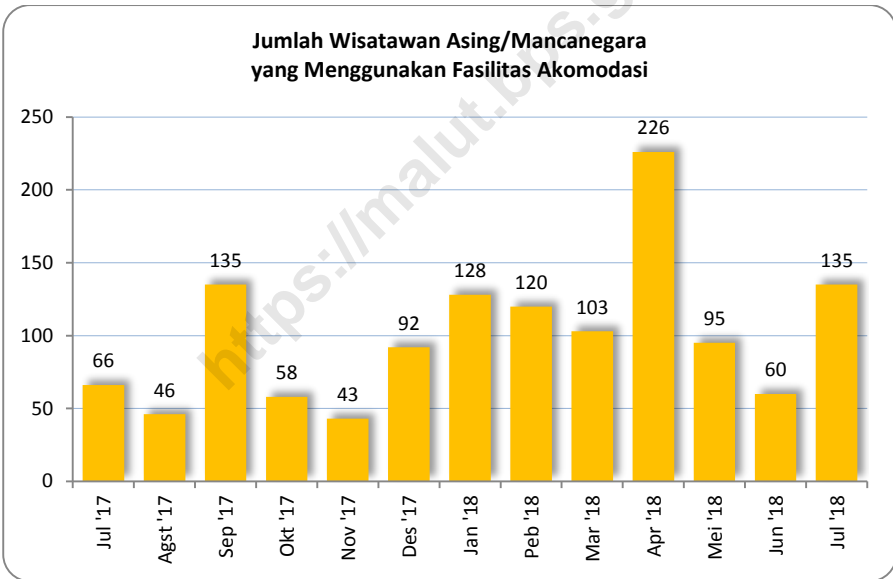
### Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Fasilitas Akomodasi Provinsi Maluku Utara

Bulan	Wisatawan Asing/Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Jul '17	66	17 628	17 694
Agst '17	46	17 371	17 417
Sep '17	135	16 679	16 814
Okt '17	58	17 897	17 955
Nov '17	43	18 358	18 401
Des '17	92	19 433	19 525
Jan '18	128	23 390	23 518
Feb '18	120	24 015	24 135
Mar '18	103	29 120	29 223
Apr '18	226	31 797	32 022
Mei '18	95	27 001	27 097
Jun '18	60	22 800	22 859
Jul '18	135	28 718	28 853

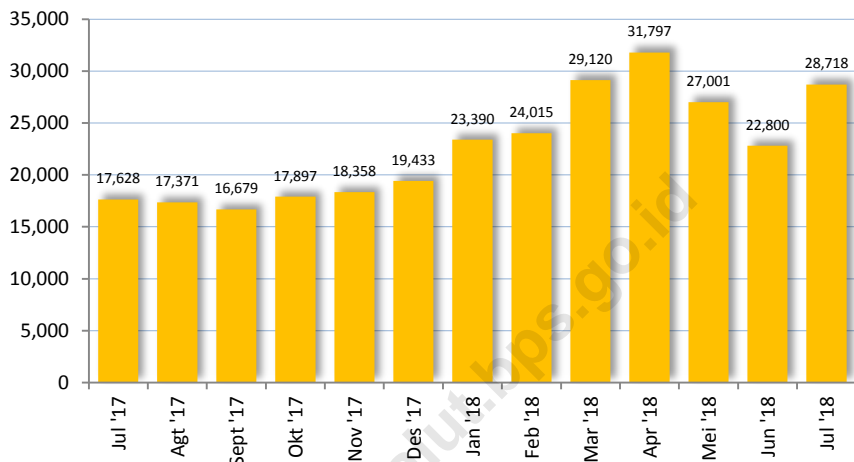
### Tingkat Penghunian Kamar Provinsi Maluku Utara

Bulan	TPK
(1)	(4)
Jul '17	30,25
Agst '17	31,60
Sep '17	33,56
Okt '17	33,11
Nov '17	35,87
Des '17	27,67
Jan '18	25,80
Feb '18	32,09
Mar '18	33,11
Apr '18	38,02
Mei '18	27,72
Jun '18	23,84
Jul '18	32,49

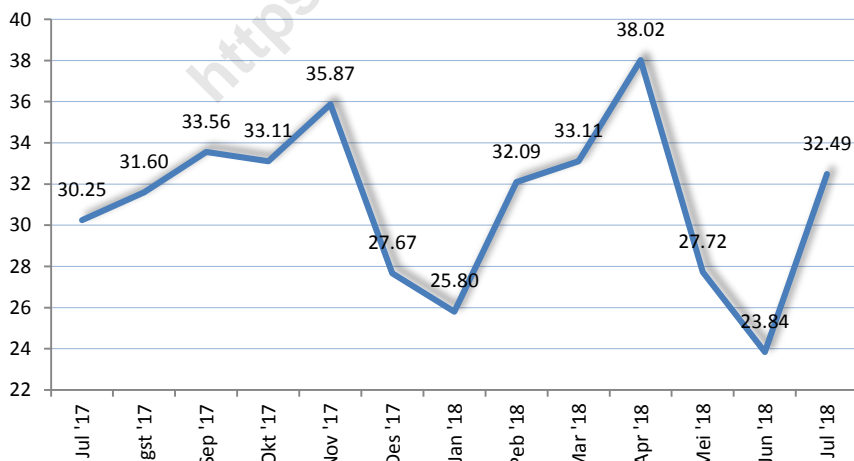
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam kamar yang tersedia dikali 100 persen.
- Tingkat Pemakaian Tempat Tidur adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya malam tempat tidur yang tersedia dikali 100 persen.
- Rata-rata Lamanya Tamu Menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang menginap di akomodasi.
- Rata-rata Tamu Per Kamar (GPR) adalah perbandingan antara banyaknya malam tamu atau malam tempat tidur dengan banyaknya malam kamar yang dihuni.
- Keterangan:
  - 1 malam kamar = 1 kamar x 1 malam
  - 1 malam tempat tidur = 1 tempat tidur x 1 malam
  - 1 malam tamu = 1 tamu x 1 malam



**Jumlah Wisatawan Nusantara yang Menggunakan Fasilitas Akomodasi**



**Tingkat Penghunian Kamar**



## PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

### PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

Kategori	Uraian	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		III 2017	IV 2017	I 2018	II 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 965,0	1 945,9	1 997,5	2 047,9
B	Pertambangan dan Penggalian	771,5	783,5	904,8	940,4
C	Industri Pengolahan	583,8	592,8	574,7	595,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,2	8,5	8,1	8,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,5	6,6	6,5	6,8
F	Konstruksi	534,8	581,5	568,2	585,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 435,4	1 432,1	1 473,5	1 562,5
H	Transportasi dan Pergudangan	515,2	521,2	526,7	549,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,7	38,8	39,2	39,7
J	Informasi dan Komunikasi	300,7	305,0	306,3	312,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	252,0	270,3	273,3	278,5
L	Real Estate	9,4	9,6	9,9	10,2
M,N	Jasa Perusahaan	26,2	26,3	26,9	28,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 279,9	1 372,0	1 266,8	1 403,2
P	Jasa Pendidikan	300,5	311,7	305,4	313,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167,2	175,5	178,8	182,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	63,5	64,0	64,7	67,9
<b>PDRB</b>		<b>8 257,4</b>	<b>8 445,3</b>	<b>8 531,1</b>	<b>8 932,8</b>

**PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)**

Kate- gori	Uraian	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017	Triwulan I 2018	Triwulan II 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 284,4	1 265,1	1 295,9	1 316,0
B	Pertambangan dan Penggalian	573,2	579,7	626,4	601,9
C	Industri Pengolahan	472,2	470,7	450,5	433,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,3	6,5	6,1	6,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,3	5,4	5,3	5,5
F	Konstruksi	388,6	416,9	402,8	411,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 057,5	1 060,7	1 074,7	1 118,4
H	Transportasi dan Pergudangan	343,2	346,7	352,5	361,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,4	28,2	28,4	28,8
J	Informasi dan Komunikasi	261,3	265,0	266,0	269,8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	175,9	186,3	186,9	188,8
L	Real Estate	7,1	7,2	7,3	7,4
M,N	Jasa Perusahaan	20,0	20,2	20,3	20,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	907,5	976,8	904,9	970,8
P	Jasa Pendidikan	199,7	205,6	201,0	205,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	125,1	130,6	131,0	132,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	49,5	49,9	50,3	52,6
	<b>PDRB</b>	<b>5 904,3</b>	<b>6 021,5</b>	<b>6 010,4</b>	<b>6 132,6</b>



**Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persentase)**

Kategori	Uraian	Triw I-2018	Triw II-2018	Triw I-2018	Triw II-2018	Laju	Sumber
		terhadap Triw IV-2017	terhadap Triw I-2018	terhadap Triw I-2017	terhadap Triw II-2017	Pertumbuhan Tahun 2017	Pertumbuhan Triw II - 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,44	1,55	2,01	2,76	3,16	0,62
B	Pertambangan dan Penggalian	8,05	-3,90	14,77	9,06	11,22	0,88
C	Industri Pengolahan	-4,29	-3,70	30,89	14,76	32,13	0,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,33	8,59	3,30	4,26	7,42	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1,70	4,58	4,12	4,88	7,11	0,00
F	Konstruksi	-3,37	2,19	8,36	8,94	8,24	0,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,32	4,07	6,20	7,60	6,46	1,38
H	Transportasi dan Pergudangan	1,70	2,44	8,27	8,01	8,01	0,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	1,31	6,59	8,37	9,72	0,04
J	Informasi dan Komunikasi	0,37	1,43	7,26	6,24	6,67	0,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,28	1,06	9,67	8,33	5,28	0,25
L	Real Estate	2,01	1,24	7,48	6,50	8,19	0,01
M,N	Jasa Perusahaan	0,48	2,95	7,46	7,38	6,64	0,03
O	Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-7,36	7,28	4,71	8,18	5,57	1,28
P	Jasa Pendidikan	-2,23	2,43	5,70	6,94	5,63	0,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,32	1,04	10,61	8,74	6,20	0,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,76	4,74	8,46	10,09	6,14	0,08
	<b>PDRB</b>	<b>-0,18</b>	<b>2,03</b>	<b>7,90</b>	<b>7,31</b>	<b>7,67</b>	<b>7,31</b>

**PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (milyar rupiah)**

Komponen	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017	Triwulan I 2018	Triwulan II 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 555,3	4 662,0	4 735,9	5 025,7
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	96,0	102,1	104,0	117,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2 723,7	3 425,7	2 132,8	2 975,0
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 426,4	3 010,4	2 379,7	2 590,6
5. Perubahan Inventori	-367,9	-202,5	146,2	- 30,3
6. Ekspor Luar Negeri	1 256,8	1 562,3	1 782,1	2 343,0
7. Impor Luar Negeri	850,6	893,7	1 057,7	848,0
8. Net Ekspor Antar Daerah	-1 582,2	-3 220,9	-1 692,0	-3 240,3
<b>PDRB</b>	<b>8 257,4</b>	<b>8 445,3</b>	<b>8 531,1</b>	<b>8 932,8</b>

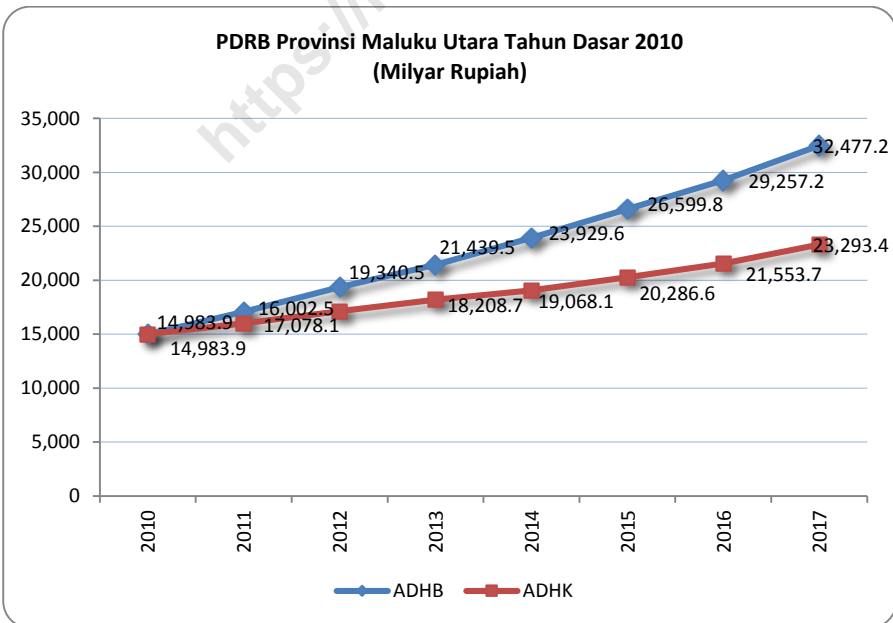
**PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (milyar rupiah)**

Komponen	Triwulan III 2017	Triwulan IV 2017	Triwulan I 2018	Triwulan II 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 251,3	3 326,9	3 330,0	3 462,2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	70,6	74,4	74,9	82,1
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 805,0	2 289,5	1 438,3	1 926,0
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 804,7	2 219,4	1 753,0	1 875,5
5. Perubahan Inventori	- 222,3	- 121,2	86,0	- 17,5
6. Ekspor Luar Negeri	1 166,6	1 331,2	1 382,5	1 675,4
7. Impor Luar Negeri	588,0	620,4	677,6	543,6
8. Net Ekspor Antar Daerah	- 1 383,7	- 2 478,3	- 1 376,8	- 2 327,5
<b>PDRB</b>	<b>5 904,3</b>	<b>6 021,5</b>	<b>6 010,4</b>	<b>6 132,6</b>

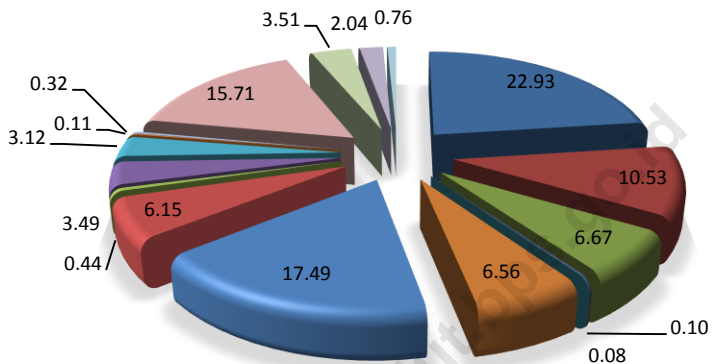
**PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Tahun Dasar 2010, rupiah)**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	14 757 254	15 844 580	17 036 539
Halmahera Tengah	30 989 548	34 473 185	36 572 532
Kepulauan Sula	18 812 749	20 049 434	21 375 420
Halmahera Selatan	18 137 098	19 505 537	22 585 467
Halmahera Utara	22 754 639	24 407 985	26 452 404
Halmahera Timur	27 197 203	28 649 313	30 726 218
Pulau Morotai	17 794 041	19 257 462	20 609 925
Pulau Taliabu	19 122 379	20 775 118	22 401 778
Ternate	33 308 525	36 129 394	38 940 149
Tidore Kepulauan	21 477 310	22 979 085	24 705 799
Maluku Utara	22 917 725	24 586 372	26 686 059

- PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu.
- PDRB dihitung berdasarkan:
  1. Atas dasar harga berlaku (ADHB), Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
  2. Atas dasar harga konstan (ADHK), Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun dasar tertentu sebagai dasar.
- Pendekatan yang digunakan dalam penghitungan PDRB ada 3 macam, yaitu:
  1. Pendekatan Produksi, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah dalam jangka waktu tertentu.
  2. Pendekatan Pendapatan, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi (FP) yang digunakan dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
  3. Pendekatan Pengeluaran, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (unit institusi). Pengeluaran yang dimaksud diistilahkan sebagai permintaan akhir.



**Struktur PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan II Tahun 2018**



- A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B - Pertambangan dan Penggalian
- C - Industri Pengolahan
- D - Pengadaan Listrik dan Gas
- E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- F - Konstruksi
- G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- H - Transportasi dan Pergudangan
- I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J - Informasi dan Komunikasi

**INDEKS TENDENSI KONSUMEN**

<b>Indeks Tendensi Konsumen Menurut Variabel Pembentuknya</b>				
<b>Variabel Pembentuk</b>	<b>Triwulan III-2017</b>	<b>Triwulan IV-2017</b>	<b>Triwulan I-2018</b>	<b>Triwulan II-2018</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Pendapatan rumah tangga	112,89	102,27	101,10	145,75
Pengaruh inflasi terhadap total pengeluaran rumah tangga	103,22	103,35	100,06	117,31
Volume/frekuensi konsumsi barang/jasa	94,35	102,94	107,74	129,23
<b>Indeks Tendensi Konsumen</b>	<b>106,27</b>	<b>102,71</b>	<b>102,25</b>	<b>129,95</b>

- Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik melalui Survei Tendensi Konsumen (STK).
- ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.
- Responden STK merupakan sub-sampel dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) khusus di daerah perkotaan.
- Pemilihan sampel dilakukan secara panel antar triwulan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan persepsi konsumen antar waktu.
- Nilai ITK Provinsi Maluku Utara pada Triwulan III-2018 diperkirakan sebesar 91,26, artinya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan yang akan datang diperkirakan akan menurun. Angka tersebut menggambarkan tingkat optimisme konsumen diperkirakan akan menurun dibandingkan Triwulan II-2018 (nilai ITK sebesar 129,95).

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

### Indeks Pembangunan Manusia dan Peringkat Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Halmahera Barat	61,47	62,06	62,97	63,83	64,19	5	5	5	5	5
Halmahera Tengah	60,89	61,49	62,07	63,05	63,89	6	6	6	6	6
Kepulauan Sula	59,77	60,18	60,50	61,25	62,04	8	8	8	8	8
Halmahera Selatan	59,92	60,34	61,26	62,17	62,64	7	7	7	7	7
Halmahera Utara	63,81	64,18	65,04	66,02	66,52	3	3	3	3	3
Halmahera Timur	62,71	63,26	63,99	64,92	65,77	4	4	4	4	4
Pulau Morotai	57,97	58,34	59,27	59,87	60,71	9	9	9	9	9
Pulau Taliabu	56,86	57,31	58,26	58,66	59,03	10	10	10	10	10
Ternate	76,69	77,15	77,64	77,80	78,48	1	1	1	1	1
Tidore Kepulauan	66,25	66,76	67,45	68,37	69,25	2	2	2	2	2
<b>Maluku Utara</b>	<b>64,78</b>	<b>65,18</b>	<b>65,91</b>	<b>66,63</b>	<b>67,20</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

*Keterangan: Peringkat kabupaten/kota berdasarkan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, sedangkan peringkat provinsi berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia*

### Komponen Pembentuk IPM Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (RP 000)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	65,45	65,55	13,05	13,06	7,86	7,87	7 076	7 266
Halmahera Tengah	62,60	62,80	12,70	12,92	8,14	8,37	7 481	7 688
Kepulauan Sula	62,50	62,60	12,23	12,38	7,96	8,33	6 741	6 859
Halmahera Selatan	65,11	65,20	12,31	12,52	7,42	7,43	6 894	7 026
Halmahera Utara	68,86	68,94	13,06	13,22	8,35	8,36	7 110	7 302
Halmahera Timur	67,67	67,85	12,48	12,72	7,77	7,89	7 560	7 841
Pulau Morotai	66,13	66,28	11,92	12,17	6,88	6,89	5 888	6 167
Pulau Taliabu	61,20	61,32	11,73	11,87	7,42	7,43	6 208	6 306
Ternate	70,17	70,27	15,06	15,30	11,13	11,25	12 643	12 989
Tidore Kepulauan	68,54	68,64	13,74	13,90	9,11	9,39	7 772	8 044
<b>Maluku Utara</b>	<b>67,51</b>	<b>67,54</b>	<b>13,45</b>	<b>13,56</b>	<b>8,52</b>	<b>8,61</b>	<b>7 545</b>	<b>7 792</b>

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.
- IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); 2) Pengetahuan (*knowledge*); dan 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).
- IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.
- Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity - PPP*).

- Persamaan IPM dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

dimana:

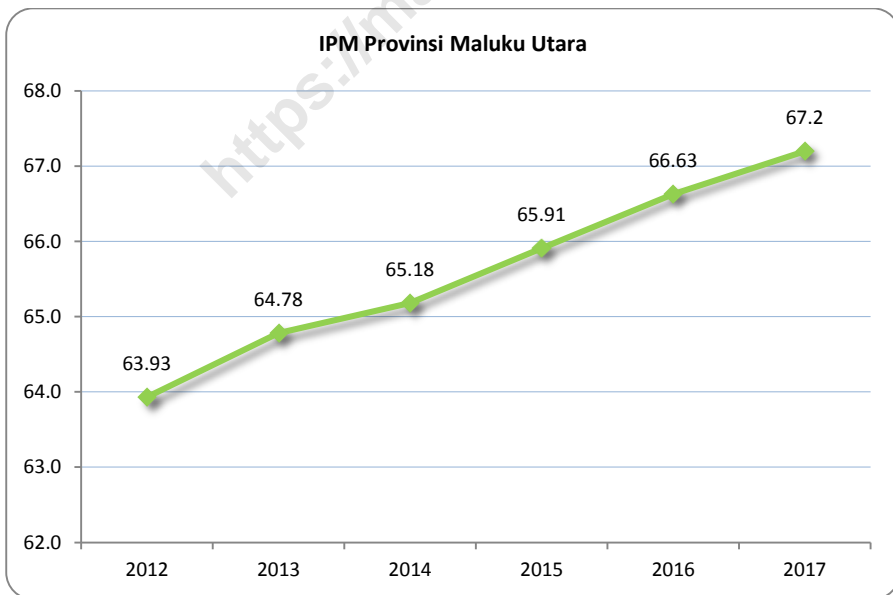
$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$





## INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

### Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara

Tahun	Indeks Pembangunan Gender
(1)	(2)
2010	85,29
2011	85,31
2012	87,06
2013	87,96
2014	88,79
2015	88,86

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender.
- Sebelum menghitung IPG, dihitung terlebih dahulu pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata ( $X_{ede}$ ).
- Cara penghitungan IPG:

$$IPG = \frac{X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis}}{3}$$

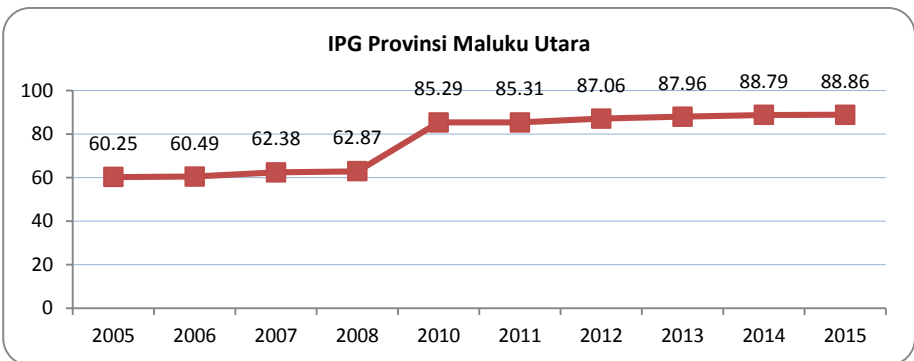
$$X_{ede} = \left( P_f X_f^{(1-\epsilon)} + P_m X_m^{(1-\epsilon)} \right)^{1/(1-\epsilon)}$$

dimana:

$X_{ede(1)} = X_{ede}$  untuk harapan hidup

$X_{ede(2)} = X_{ede}$  untuk pendidikan

$I_{inc-dis}$  = Indeks distribusi pendapatan



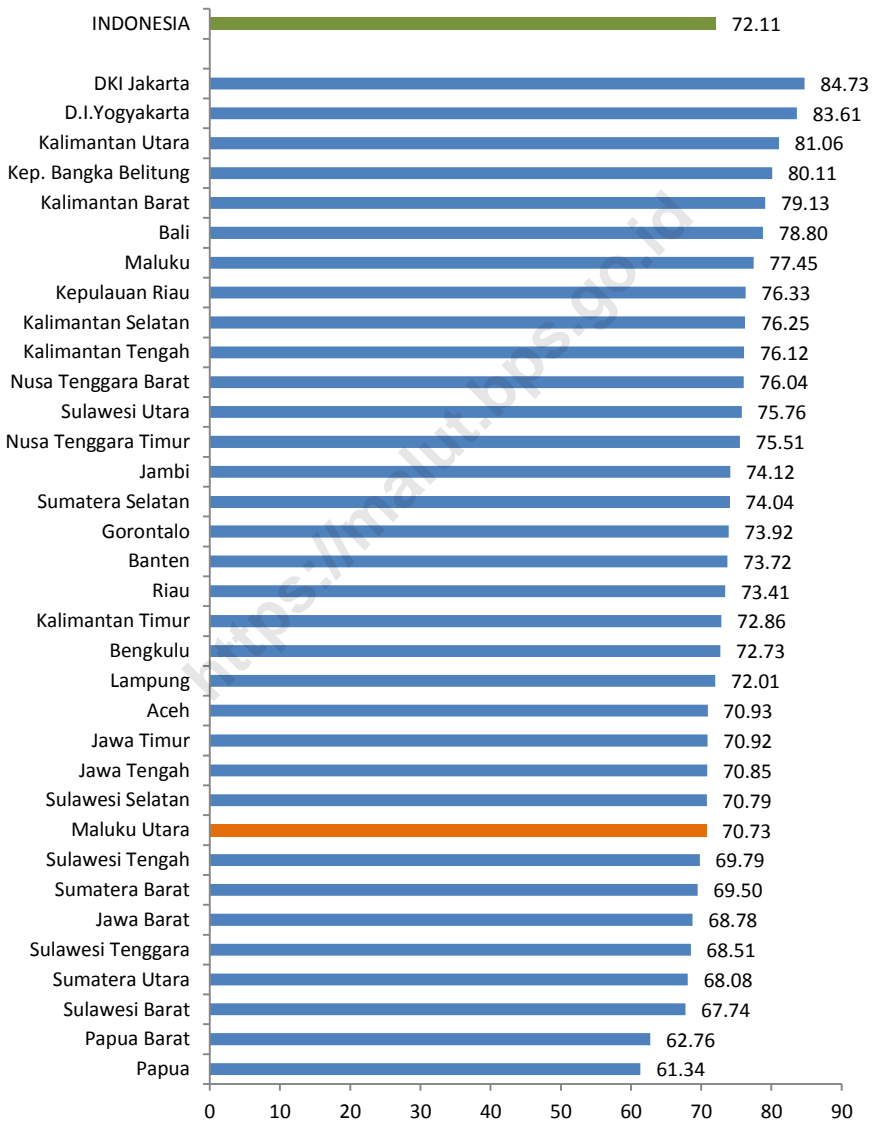
## INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

### Aspek dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara

Aspek Demokrasi	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
I. Kebebasan Sipil	88,15	83,67	76,90	73,53	92,27	77,66
II. Hak-Hak Politik	50,13	48,94	60,61	61,00	61,79	65,84
III. Lembaga Demokrasi	66,55	63,40	68,16	47,25	67,59	54,02
<b>Indeks Keseluruhan</b>	<b>66,83</b>	<b>64,06</b>	<b>67,90</b>	<b>61,52</b>	<b>73,27</b>	<b>70,73</b>

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi.
- Aspek demokrasi yang digunakan dalam penyusunan IDI adalah:
  1. Kebebasan sipil (*civil liberties*)
  2. Hak-hak politik (*political rights*)
  3. Lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*)
- Tiga aspek demokrasi tersebut terbagi menjadi 11 variabel yang terbagi lagi menjadi 28 indikator.
- Manfaat IDI yaitu:
  1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.
  2. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.
  3. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

**Indeks Demokrasi Indonesia 2017 Menurut Peringkat**



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No 65, Ternate

Telp: (0921) 3127878, Fax: (0921) 3126301

Homepage: <http://malut.bps.go.id>, Email: [malut@bps.go.id](mailto:malut@bps.go.id)